

PARADIGMA MODERN DALAM RANA PENDIDIKAN ISLAM

Firdaus

Dosen UIN Alauddin DPK. STAI Al-Furqan Makassar

Abstract

In an effort to reform Islamic education need to be formulated clearly the implications of the verses of the Qur'an and hadith concerning the "nature" or innate potential, the mission and goal of human life. Because these formulations will be basic concepts of Islamic education philosophy. To that end, philosophy or any basic assumption of Islamic education can only be applied properly if the environmental conditions (socio-cultural) considered. So, if we want to make changes Islamic education, the first step that must be done is to formulate the basic concepts of philosophical education (a) in accordance with the teachings of Islam, (b) develop empiris the principles underlying its appropriateness in the context of the environment (socio-cultural) which in this case is a civil society. Because without the basic framework of philosophical and theoretical Kuta then change Islamic education does not have a strong foundation and also do not have a definite direction. The basic concept of theoretical philosophy and Islamic education, should be placed in the context of civil society supra system in which education will be implemented.

Abstrak

Dalam usaha pembaharuan pendidikan Islam perlu dirumuskan secara jelas implikasi ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang menyangkut dengan "fitrah" atau potensi bawaan, misi dan tujuan hidup manusia. Karena rumusan tersebut akan menjadi konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Untuk itu, filsafat atau segala asumsi dasar pendidikan Islam hanya bisa diterapkan secara baik jikalau kondisi-kondisi lingkungan (sosial-kultural) diperhatikan. Jadi, apabila kita ingin mengadakan perubahan pendidikan Islam maka langkah awal yang harus dilakukan adalah merumuskan konsep dasar filosofis pendidikan yang (a) sesuai dengan ajaran Islam, (b) mengembangkan secara empiris prinsip-prinsip yang mendasari keterlaksanaannya dalam konteks lingkungan (sosial-kultural) yang dalam hal ini adalah masyarakat madani. Karena tanpa kerangka dasar filosofis dan teoritis yang kuta maka perubahan pendidikan Islam tidak punya pondasi yang kuat dan juga tidak mempunyai arah yang pasti. Konsep dasar filsafat dan teoritis pendidikan Islam, harus ditempatkan dalam konteks supra sistem masyarakat madani di mana pendidikan itu akan diterapkan.

Kata Kunci: Paradigma, modern, Pendidikan Islam

I. PENDAHULUAN

Ada pandangan yang kuat di kalangan para pendidik radikal bahwa pendidikan dan penyelenggaraan proses belajar mengajar di antaranya dalam bentuk pelatihan, pada dasarnya tidak pernah terbebas dari kepentingan politik dan sistem sosial ekonomi dalam kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, hakikat pendidikan bagi golongan mereka tidak lebih sebagai sarana untuk mereproduksi sistem dan struktur sosial yang tidak adil, seperti sistem kelas,

relasi gender, relasi rasisme, ataupun relasi sistem lainnya. Pandangan seperti ini sering disebut dengan pendidikan sebagai reproduksi sosial.

Sistem pendidikan Islam yang selama ini dirasa sangat terpuruk, hal ini diperparah lagi dengan adanya model pendidikan yang tertutup, eksklusif dan lebih menekankan pada performen ketimbang nilai-nilai Islam yang transenden. Masyarakat Islam selama ini hanya banga dengan kejayaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang berhasil diraihinya pada masa lalu, tanpa memela-

jari bagaimana keberhasilan dan ketinggian ilmu pengetahuan dan kebayaan tersebut diperolehnya.

Lebih parah lagi, dunia pendidikan Islam dikritik habis-habisan oleh dunia barat bahwa; pendidikan Islam hanya mengutamakan hafalan, ilmu bebas tak diajarkan dan dominasi agama, dikendalikan kelompok radikal, anti Yahudi-Kristen-Amerika, menanamkan semangat teror, jiwa merdeka tak ditanamkan.

Pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju taklif /kedewasaan, baik secara akal, mental maupun moral, untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai seorang hamba dihadapan Khaliq-nya dan sebagai “pemelihara/khalifah” di dunia ini. Dengan demikian, fungsi utama pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik atau generasi penerus dengan kemampuan dan keahlian/skill yang diperlukan agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terjun ke tengah masyarakat dan lingkungan, sebagai tujuan akhir dari pendidikan. Tujuan akhir pendidikan dalam Islam, sebagai proses pembentukan diri peserta didik agar sesuai dengan fitrah keberadaannya.

Dengan demikian, fungsi utama pendidikan adalah mempersiapkan generasi penerus (peserta didik) dengan kemampuan dan keahliannya (*skill*) yang diperlukan agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terjun ke tengah lingkungan masyarakat.

Dalam lintasan sejarah peradaban Islam, peran pendidikan ini benar-benar bisa diaktualisasikan dan diaplikasikan tepatnya pada zaman kejayaan Islam, yang mana itu semua adalah sebuah proses dari sekian lama kaum muslimin berkecimpung dalam naungan ilmu-ilmu ke-Islaman yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Hal ini dapat kita saksikan, di mana pendidikan benar-benar mampu membentuk peradaban sehingga peradaban Islam menjadi peradaban terdepan sekaligus peradaban yang

mewarnai sepanjang jazirah Arab, Afrika, Asia Barat hingga Eropa timur. Untuk itu, adanya sebuah paradigma pendidikan yang memberdayakan peserta didik merupakan sebuah keniscayaan.

Kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa ke-emasan sepanjang abad pertengahan, di mana kebudayaan dan peradaban Islam berhasil memberikan Iluminatif (pencerahan) jazirah Arab, Afrika, Asia Barat dan Eropa Timur, hal ini merupakan bukti sejarah yang tidak terbantahkan bahwa peradaban Islam tidak dapat lepas dari peran serta adanya sistem pendidikan yang berbasis Kurikulum Samawi.

Saat ini dirasakan ada keprihatinan yang sangat mendalam tentang dikotomi ilmu agama dengan ilmu umum. Kita mengenal dan meyakini adanya sistem pendidikan agama dalam hal ini pendidikan Islam dan sistem pendidikan umum. Kedua sistem tersebut lebih dikenal dengan pendidikan tradisional untuk yang pertama dan pendidikan modern untuk yang kedua.

Seiring dengan itu berbagai istilah yang kurang sedap pun hadir ke permukaan, misalnya, adanya fakultas agama dan fakultas umum, sekolah agama dan sekolah umum. Bahkan dikotomi itu menghasilkan kesan bahwa pendidikan agama berjalan tanpa dukungan IPTEK, dan sebaliknya pendidikan umum hadir tanpa sentuhan agama.

Usaha untuk mencari paradigma baru pendidikan Islam tidak akan pernah berhenti sesuai dengan zaman yang terus berubah dan berkembang. Meskipun demikian tidak berarti bahwa pemikiran untuk mencari paradigma baru pendidikan itu bersifat reaktif dan defensive, yaitu menjawab dan membela kebenaran setelah adanya tantangan. Upaya mencari paradigma baru, selain harus mampu membuat konsep yang mengandung nilai-nilai dasar dan strategis yang a-produktif dan antisipatif, mendahului perkembangan masalah yang akan hadir di masa mendatang, juga harus mampu

memper-tahankan nilai-nilai dasar yang benar-benar diyakini untuk terus dipelihara dan dikembangkan.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Pendidikan Islam

Sebelum membahas tentang pengertian pendidikan Islam, terlebih dahulu membahas apa itu pendidikan? Menurut M.J. Langeveld; "Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing yang belum kepada kedewasaan. Sedangkan Ahmad D.Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh sipendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani siterdidik menuju terbentuknya keperibadian yang utama. Demikian dua pengertian pendidikan dari sekian banyak pengertian yang diketahui.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor: 2 Tahun 1989, "pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi perannya di masa yang akang datang. Sedangkan, "pendidikan dalam pengertian yang luas adalah meliputi perbuatan atau semua usaha generasi tua untuk mengalihkan (melimpahkan) pengetahuannya, pengalamannya, kecakapan serta keterampilan kepada generasi muda, sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniah.

Menurut para ahli Filsafat Pendidikan, dalam merumuskan pengertian pendidikan sebenarnya sangat tergantung kepada pandangan terhadap manusia; hakikat, sifat-sifat atau karakteristik dan tujuan hidup manusia itu sendiri. Perumusan pendidikan bergantung kepada pandangan hidupnya. "Apakah manusia dilihat sebagai kesatuan badan dan jasmani; badan, jiwa dan roh, atau jasmani dan rohani? Apakah manusia pada hakekatnya dianggap memeiliki kemampuan bawaan (innate) yang menentukan perkembangannya dalam lingkungannya, atau lingkungannya yang menentukan (domain) dalam perkembangan manusia? Bagimanakah

kedudukan individu dalam masyarakat? Apakah tujuan hidup manusia? Apakah manusia dianggap hanya hidup sekali di dunia ini, ataukah hidup lagi di hari kemudian (akhirat)? Demikian beberapa pertanyaan filosofis".

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, memerlukan jawaban yang menentukan pandangan terhadap hakekat dan tujuan pendidikan, dan dari sini juga sebagai pangkal perbedaan rumusan pendidikan atau timbulnya aliran-aliran pendidikan seperti ; pendidikan Islam, Kristen, Liberal, progresif atau pragmatis, komunis, demokratis, dan lain-lain. Dengan demikian, terdapat keaneka ragam pandangan tentang pendidikan. "Dalam keanekaragaman pandangan tentang pendidikan terdapat titik-titik persamaan tentang pengertian pendidikan, yaitu pendidikan dilihat sebagai suatu proses; dengan proses itu seseorang (dewasa) secara sengaja mengarahkan pertumbuhan atau perkembangan seseorang (yang belum dewasa). Proses adalah kegiatan mengarahkan perkembangan seseorang sesuai dengan nilai-nilai yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Dengan pengertian atau definisi itu, kegiatan atau proses pendidikan hanya berlaku pada manusia tidak pada hewan".

Apakah Pendidikan Islam itu? Pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang melatih perasaan murid-murid dengan cara begitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan, mereka dipengaruhi sekali oleh nilai spritual dan sangat sadar akan nilai etis Islam, atau menurut Abdurrahman an-Nahlawi, "Pendidikan Islam mengantarkan manusia pada perilaku dan perbuatan manusia yang berpedoman pada syariat Allah.

Pendidikan Islam bukan sekedar "*transper of knowledge*" ataupun "*transper of training*", tetapi lebih merupakan suatu sistem yang ditata di atas pondasi keimanan dan kesalehan; suatu sistem yang terkait secara langsung dengan Tuhan. Dengan demikian, pendidikan Islam suatu kegiatan

yang mengarahkan dengan sengaja perkembangan seseorang sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sosok pendidikan Islam dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang membawa manusia kearah kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ilmu dan ibadah. Karena pendidikan Islam membawa manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, maka yang harus diperhatikan adalah "nilai-nilai Islam tentang manusia; hakekat dan sifat-sifatnya, misi dan tujuan hidupnya di dunia ini dan akhirat nanti, hak dan kewajibannya sebagai individu dan anggota masyarakat. Semua ini dapat kita jumpai dalam al-Qur'an dan Hadits.

Jadi, "konsepsi pendidikan model Islam, tidak hanya melihat bahwa pendidikan itu sebagai upaya "mencerdaskan" semata (pendidikan intelek, kecerdasan), melainkan sejalan dengan konsep Islam tentang manusia dan hakekat eksistensinya.

Pendidikan Islam sebagai suatu pranata sosial, juga sangat terkait dengan pandangan Islam tentang hakekat keberadaan (eksistensi) manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam juga berupaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bahwa manusia itu sama di depan Allah perbedaannya adalah kadar ketaqwaan, sebagai bentuk perbedaan secara kualitatif".

Karena pendidikan berupaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pada manusia, maka sangat urgen sekali untuk memperhatikan konsep atau pandangan Islam tentang manusia sebagai makhluk yang diproses kearah kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pandangan tentang manusia antara lain:

1. Konsep Islam tentang manusia, khususnya anak, sebagai subyek didik. Sesuai dengan Hadits Rasulullah, anak manusia dilahirkan dalam Fitrah atau dengan "potensi" tertentu. Dalam al-Qur'an dikatakan "tegakkan dirimu pada agama dengan tulus dan mantap, agama yang cocok dengan Fitrah manusia yang digariskan oleh Allah. Tak ada perubahan pada ketetapan-Nya. (ar-Rum: 30).

Pada mulanya anak itu dilahirkan dengan "membawa potensi" yang perlu dikembangkan dalam dan oleh lingkungannya. "Berbeda dengan teori Tabularasa yang menganggap anak menerima "secara pasif" pengaruh lingkungannya, sedangkan konsep fitrah mengandung "potensi bawaan" aktif (*innate potentials, innate tendencies*) yang telah di berikan kepada setiap manusia oleh Allah. Bahkan dalam al-Qur'an, sebelum manusia itu lahir kemudian telah mengadakan "transaksi" atau "perjanjian" dengan Allah yaitu mengakui keesaan Tuhan, firman Allah surat al-A'raf: 172, "Ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka dan menyuruh agar mereka bersaksi atas diri sendiri; "Bukankah Aku Tuhanmu?" firman Allah. Mereka menjawab; "ya kami bersaksi" yang demikian agar kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, "kami tidak mengetahui hal ini". Memperhatikan ayat ini, berarti setiap anak yang lahir dengan membawa "potensi keimanan" terhadap Allah atau disebut dengan "Tauhid".

Sedangkan potensi bawaan yang lain misalnya potensi fisik dan intelegensi atau kecerdasan akal dengan segala kemungkinan dan keterbatasannya.

Selain itu dalam al-Qur'an banyak dijumpai ayat-ayat yang menggambarkan sifat-sifat hakiki manusia yang mempunyai implikasi baik terhadap tujuan maupun cara pengarahannya. Misalnya: Tentang tanggung jawab, bahwa manusia diciptakan tidak sia-sia, tetapi juga potensi untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan sesuai dengan tingkat kemampuan daya pikul seseorang menurut kodrat atau fitrahnya (pada al-Mu'minun: 115 dan al-Baqarah: 286), selain itu manusia pada hakekat dan menurut kejadiannya bersedia dan sanggup memikul amanah (pada al-Ahzab: 72).

Di samping itu, hal yang juga penting implikasinya bagi pendidikan adalah menurut al-Qur'an bahwa tanggung

jawab yang ada pada manusia bersifat pribadi, artinya tidaklah seseorang dapat memikul beban orang lain, beban itu dipikul sendiri tanpa melibatkan orang lain (pada Faathir: 18). Sifat lain yang ada pada manusia adalah manusia diberi oleh Allah kemam-puan al-bayan (fasih perkataan-kesadaran nurani) yaitu daya untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya melalui kemampuan berkomunikasi dengan bahasa yang baik (pada ar-Rahman: 3-4). Kemudian pada hadits Rasulullah, "barang siapa ingin mencapai kebahagiaan dunia harus ditempuh dengan ilmu dan barang siapa yang mencari kebahagiaan akhirat juga harus dengan ilmu, dan barang untuk mencari keduanya juga harus dengan ilmu".

Dengan demikian, tugas dan fungsi pendidikan adalah mengarahkan dengan sengaja segala potensi yang ada pada seseorang seoptimal mungkin sehingga ia berkembang menjadi seorang muslim yang baik.

2. Peranan pendidikan atau pengaruh perkembangan. Potensi manusia yang dibawah sejak dari lahir itu bukan hanya bisa dikembangkan dalam lingkungan tetapi juga hanya bisa berkembang secara terarah bila dengan bantuan orang lain atau pendidik. Dengan demikian, tugas pendidik mengarahkan segala potensi subyek didik seoptimal mungkin agar ia dapat memikul amanah dan tanggung jawabnya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, sesuai dengan profil manusia Muslim yang baik.
3. Profil manusia Muslim. Profil dasar seorang Muslim yang baik adalah ketaqwaan kepada Allah. Maka, perkembangan anak haruslah secara sengaja diarahkan kepada pembentukan ketaqwaan.
4. Metodologi pendidikan. Metodologi diartikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan mengarahkan perkembangan seseorang, khususnya proses belajar-mengajar. Pandangan bahwa seseorang dilahirkan dengan

potensi bawaan tertentu dan dengan itu ia mampu berkembang secara aktif dalam lingkungannya, mempunyai implikasi bahwa proses belajar-mengajar harus didasarkan pada prinsip belajar siswa aktif (student active learning).

Jadi, pendidikan menurut Islam didasarkan pada asumsi bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah yaitu dengan membawa "potensi bawaan" seperti potensi "keimanan", potensi untuk memikul amanah dan tanggung jawab, potensi kecerdasan, potensi fisik. Dengan potensi ini manusia mampu berkembang secara aktif dan interaktif dengan lingkungannya dan dengan bantuan orang lain atau pendidik secara sengaja agar menjadi manusia muslim yang mampu menjadi khalifah dan mengabdikan kepada Allah.

Bersarkan uraian di atas, pengertian pendidikan menurut al-Qur'an dan hadits sangat luas, meliputi pengembangan semua potensi bawaan manusia yang merupakan rahmat Allah. Potensi-potensi itu harus dikembangkan menjadi kenyataan berupa keimanan dan akhlak serta kemampuan beramal dengan menguasai ilmu (dunia - akhirat) dan keterampilan atau keahlian tertentu sehingga mampu memikul amanah dan tanggung jawab sebagai seorang khalifah dan Muslim yang bertaqwa. Tetapi pada realitasnya pendidikan Islam, sebagaimana yang lazim dikenal di Indonesia ini, memiliki pengertian yang agak sempit, yaitu program pendidikan Islam lebih banyak menyempit ke-pelajaran fiqh ibadah terutama, dan selama ini tidak pernah dipersoalkan apakah isi program pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan telah sesuai benar dengan luasnya pengertian pendidikan menurut al-Qur'an dan hadits (ajaran Islam).

B. Konsep Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah dalam berbagai aspek. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Selama ini, upaya pembaharuan pendidikan Islam secara

mendasar, selalu dihambat oleh berbagai masalah mulai dari persoalan dana sampai tenaga ahli. Padahal pendidikan Islam dewasa ini, dari segi apa saja terlihat goyah terutama karena orientasi yang semakin tidak jelas.

Berdasarkan uraian di atas, ada dua alasan pokok mengapa konsep pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia untuk menuju masyarakat madani sangat mendesak.

- a. Konsep dan praktek pendidikan Islam dirasakan terlalu sempit, artinya terlalu menekankan pada kepentingan akhirat. Sedangkan ajaran Islam menekankan pada keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Maka perlu pemikiran kembali konsep pendidikan Islam yang betul-betul didasarkan pada asumsi dasar tentang manusia yang akan diproses menuju masyarakat madani.
- b. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dimiliki sekarang ini, belum atau kurang mampu memenuhi kebutuhan umat Islam dalam menghadapi tantangan dunia modern dan tantangan masyarakat dan bangsa Indonesia disegala bidang. Maka, untuk menghadapi dan menuju masyarakat madani diperlukan konsep pendidikan Islam serta peran sertanya secara mendasar dalam memberdayakan umat Islam.

Suatu usaha pembaharuan pendidikan hanya bisa terarah dengan mantap apabila didasarkan pada konsep dasar filsafat dan teori pendidikan yang mantap. Filsafat pendidikan yang mantap hanya bisa dikembangkan di atas dasar asumsi-asumsi dasar yang kokoh dan jelas tentang manusia (hakekat) kejadiannya, potensi-potensi bawaannya, tujuan hidup dan misinya di dunia ini baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, hubungan dengan lingkungan dan alam semesta dan akhirnya hubungan dengan Maha Pencipta.

Teori pendidikan yang mantap hanya dapat dikembangkan atas dasar pertemuan antara penerapan atau pendekatan filsafat dan pendekatan empiris, Sehubungan dengan itu konsep dasar pembaharuan

pendidikan Islam adalah perumusan konsep filsafat dan teoritis pendidikan yang didasarkan pada asumsi-asumsi dasar tentang manusia dan hubungannya dengan lingkungan dan menurut ajaran Islam.

Dalam usaha pembaharuan pendidikan Islam perlu dirumuskan secara jelas implikasi ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang menyangkut dengan "fitrah" atau potensi bawaan, misi dan tujuan hidup manusia. Karena rumusan tersebut akan menjadi konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Untuk itu, filsafat atau segala asumsi dasar pendidikan Islam hanya bisa diterapkan secara baik jikalau kondisi-kondisi lingkungan (sosial-kultural) diperhatikan.

Jadi, apabila kita ingin mengadakan perubahan pendidikan Islam maka langkah awal yang harus dilakukan adalah merumuskan konsep dasar filosofis pendidikan yang (a) sesuai dengan ajaran Islam, (b) mengembangkan secara empiris prinsip-prinsip yang mendasari keterlaksanaannya dalam konteks lingkungan (sosial - kultural) yang dalam hal ini adalah masyarakat madani. Karena tanpa kerangka dasar filosofis dan teoritis yang kuat maka perubahan pendidikan Islam tidak punya pondasi yang kuat dan juga tidak mempunyai arah yang pasti.

Konsep dasar filsafat dan teoritis pendidikan Islam, harus ditempatkan dalam konteks supra sistem masyarakat madani di mana pendidikan itu akan diterapkan.

Proses pendidikan yang berakar dari kebudayaan, berbeda dengan praksis pendidikan yang terjadi dewasa ini yang cenderung mengalienasikan proses pendidikan dari kebudayaan. Kita memerlukan suatu perubahan paradigma [*paradigma shift*] dari pendidikan untuk menghadapi proses globalisasi dan menata kembali kehidupan masyarakat Indonesia. Cita-cita era reformasi tidak lain ialah membangun suatu masyarakat madani Indonesia¹, oleh karena itu, arah perubahan paradigma baru pendidikan Islam diarahkan untuk terben-

¹H.A.R. Tilaah, *Pendidikan, Kebudayaan, ...*, hlm. 168.

tuknya masyarakat madani Indonesia tersebut.

Arah perubahan paradigma pendidikan dari paradigma lama ke paradigma baru, terdapat berbagai aspek mendasar dari upaya perubahan tersebut, yaitu, *Pertama*, paradigma lama terlihat upaya pendidikan lebih cenderung pada: sentralistik, kebijakan lebih bersifat *top down*, orientasi pengembangan pendidikan lebih bersifat parsial, karena pendidikan didisain untuk sektor pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, serta teknologi perakitan. Peran pemerintah sangat dominan dalam kebijakan pendidikan, dan lemahnya peran institusi pendidikan dan institusi non-sekolah.

Kedua, paradigma baru, orientasi pendidikan pada: disentralistik, kebijakan pendidikan bersifat *bottom up*, orientasi pengembangan pendidikan lebih bersifat *holistik*; artinya pendidikan ditekankan pada pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya, kemajemukan berpikir, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum. Meningkatkan peran serta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif dalam upaya pengembangan pendidikan, pemberdayaan institusi masyarakat, seperti keluarga, LSM, pesantren, dunia usaha², lembaga-lembaga kerja, dan pelatihan, dalam upaya pengelolaan dan pengembangan pendidikan, yang diorientasikan kepada terbentuknya masyarakat madani Indonesia.

Berdasarkan pandangan ini, pendidikan Islam sudah harus diupayakan untuk mengalihkan paradigma yang berorientasi ke masa lalu [abad pertengahan] ke paradigma yang berorientasi ke masa depan, yaitu mengalihkan dari paradigma pendidikan yang hanya mengawetkan kemajuan, ke paradigma pendidikan yang merintis kemajuan. Mengalihkan paradigma dari yang berwatak *feodal* ke paradigma pendidikan yang berjiwa demokratis³.

Mengalihkan paradigma dari pendidikan sentralisasi ke paradigma pendidikan desentralisasi, sehingga menjadi pendidikan Islam yang kaya dalam keberagaman, dengan titik berat pada peran masyarakat dan peserta didik. Dalam proses pendidikan, perlu dilakukan “kesetaraan perlakuan sektor pendidikan dengan sektor lain, pendidikan berorientasi rekonstruksi sosial, pendidikan dalam rangka pemberdayaan umat dan bangsa, pemberdayaan infrastruktur sosial untuk kemajuan pendidikan Islam. Pembentukan kemandirian dan keberdayaan untuk mencapai keunggulan, penciptaan iklim yang kondusif untuk tumbuhnya toleransi dan konsensus dalam kemajemukan. Dari pandangan ini, berarti diperlukan perencanaan terpadu secara *horizontal* [antarsektor] dan vertikal [antar jenjang-*bottom-up* dan *top-down planning*], pendidikan harus berorientasi pada peserta didik dan pendidikan harus bersifat multikultural serta pendidikan dengan perspektif global”⁴.

Konsep paradigma pendidikan tersebut, paling tidak memberikan arah sesuai dengan arah pendidikan, yang secara makro dituntut menghantarkan masyarakat menuju masyarakat madani Indonesia yang demokratis, relegius, dan tangguh menghadapi lingkungan global.

Maka dalam upaya pembaruan pendidikan Islam, perlu ada ikhtiar, yaitu strategi kebijakan perubahan diletakan untuk menangkap kesempatan perubahan tersebut. Maka mau tidak maun, pendidikan Islam harus meninggalkan paradigma lama menuju paradigma baru, berorientasi pada masa depan, merintis kemajuan, berjiwa demokratis, bersifat desentralistik, berorientasi pada peserta didik, bersifat multikultural dan berorientasi pada perspektif global, sehingga terbentuk pendidikan yang berkualitas dalam menghadapi tantangan perubahan global menuju terbentuknya masyarakat madani Indonesia. Sebab pada

²Fasli Jalal, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita, 2001), hlm.5.

³Winarno Surakhmad, *Profesionalisme Dunia Pendidikan*, From: [http://www. Bpk penabur.or.id/](http://www.Bpk_penabur.or.id/)

[kps-jkt/berita/200006/ artikel2.htm](http://kps-jkt/berita/200006/artikel2.htm), Jakarta, 27 Mei 2002.

⁴Fasli Jalal, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, hlm.5.

dataran konsep, pendidikan baik formal maupun non formal “pada dasarnya memiliki peran penting melegitimasi bahkan melanggengkan sistem dan struktur sosial yang ada dan sebaliknya pendidikan merupakan proses perubahan sosial. Tetapi, peran pendidikan terhadap sistem dan struktur sosial tersebut, sangat bergantung pada paradigma pendidikan yang mendasarinya”⁵.

Berdasarkan pandangan di atas, maka peran pendidikan Islam mestinya bukan hanya “dipahami dalam konteks mikro [kepentingan anak didik yang dilayani melalui proses interaksi pendidikan], melainkan juga dalam konteks makro, yaitu kepentingan masyarakat yang dalam hal ini termasuk masyarakat bangsa, negara dan bahkan juga kemanusiaan pada umumnya”⁶, sehingga pendidikan Islam integratif antara proses belajar di sekolah dengan belajar di masyarakat [*learning society*]. Brubacher dalam bukunya, *Modern Philosophies of Education* [1978], menyatakan hubungan pendidikan dengan masyarakat mencakup hubungan pendidikan dengan perubahan sosial, tatanan ekonomi, politik dan negara, karena pendidikan itu terjadi di masyarakat, dengan sumber daya masyarakat, dan untuk masyarakat, maka pendidikan dituntut untuk mampu memperhitungkan dan melakukan antisipasi terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik dan kenegaraan secara simultan. Sedangkan, secara mikro pendidikan senantiasa memperhitungkan individualitas atau karakteristik perbedaan antara individu peserta didik⁷ dalam kerangka interaksi proses belajar.

Dengan demikian, kerangka acuan pemikiran dalam penataan dan pengembangan sistem pendidikan Islam menuju masyarakat madani Indonesia, harus mampu mengakomodasikan berbagai pandangan secara selektif sehingga terdapat keterpaduan dalam konsep, yaitu:

⁵ Mansour Fakih, *Pendidikan Populer Membangun Kesadaran Kritis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.18.

⁶Fasli Jalal, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, hlm.16-17.

⁷ Ibid, hlm. 16

Pertama, pendidikan harus membangun prinsip kesetaraan antara sektor pendidikan dengan sektor-sektor lain. Sistem pendidikan harus senantiasa bersama-sama dengan sistem lain untuk mewujudkan cita-cita masyarakat madani Indonesia. Pendidikan bukan merupakan sesuatu yang eksklusif dan terpisah dari masyarakat dan sistem sosialnya, tetapi pendidikan sebagai suatu sistem terbuka dan senantiasa berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya.

Kedua, pendidikan merupakan wahana pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan penciptaan dan pemeliharaan sumber yang berpengaruh, seperti keluarga, sekolah, media massa, dan dunia usaha.

Ketiga, prinsip pemberdayaan masyarakat dengan segenap institusi sosial yang ada di dalamnya, terutama institusi yang dilekatkan dengan fungsi mendidik generasi penerus bangsa. Seperti pesantren, keluarga, dan berbagai wadah organisasi pemuda, diberdayakan untuk dapat mengembangkan fungsi pendidikan dengan baik serta menjadi bagian yang terpadu dari pendidikan.

Keempat, prinsip kemandirian dalam pendidikan dan prinsip pemerataan menurut warga negara secara individual maupun kolektif untuk memiliki kemampuan bersaing dan sekaligus kemampuan bekerja sama.

Kelima, dalam kondisi masyarakat pluralistik diperlukan prinsip toleransi dan konsensus. Untuk itu, pendidikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan penciptaan dan pemeliharaan sumber-sumber tersebut secara dinamik.

Keenam, prinsip perencanaan pendidikan. Pendidikan selalu dituntut untuk cepat tanggap atas perubahan yang terjadi dan melakukan upaya yang tepat secara normatif sesuai dengan cita-cita masyarakat madani Indonesia. Maka, pendidikan selalu bersifat *progresif* tidak resisten terhadap perubahan, sehingga mampu mengendalikan dan mengantisipasi arah perubahan.

Ketujuh, prinsip rekonstruksionis, bahwa kondisi masyarakat selalu menghendaki perubahan mendasar. Maka pendidikan harus mampu menghasilkan produk-produk

yang dibutuhkan oleh perubahan tersebut. Paham rekonstruksionis mengkritik pandangan pragmatis sebagai suatu pandangan yang cocok untuk kondisi yang relatif stabil. Pendekatan pemecahan masalah bersifat lebih berorientasi masa kini, sedangkan pendekatan *rekonstruksionis* lebih berorientasi masa depan dengan tetap berpijak pada kondisi sekarang.

Kedelapan, prinsip pendidikan berorientasi pada peserta didik. Dalam memberikan pelayanan pendidikan, sifat-sifat peserta didik yang umum maupun yang spesifik harus menjadi pertimbangan. Layanan pendidikan untuk kelompok usia anak berbeda dengan remaja dan dewasa, termasuk perbedaan pelayanan bagi kelompok anak-anak berkelainan fisik dan mental termasuk pendekatan pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil tidak dapat disamakan dengan anak-anak di perkotaan.

Kesembilan, prinsip pendidikan multi-kultural. Sistem pendidikan harus memahami bahwa masyarakat yang dilayaninya bersifat plural, sehingga pluralisme harus menjadi acuan dalam mengembangkan pendidikan dan pendidikan dapat memanfaatkan perbedaan tersebut sebagai sumber dinamika yang bersifat positif dan konstruktif.

Kesepuluh, pendidikan dengan prinsip global, artinya pendidikan harus berperan dan harus menyiapkan peserta didik dalam konstelasi masyarakat global⁸.

Upaya membangun pendidikan Islam berwawasan global bukan persoalan mudah, karena pada waktu bersamaan pendidikan Islam harus memiliki kewajiban untuk melestarikan, menamkan nilai-nilai ajaran Islam dan dipihak lain berusaha untuk menanamkan karakter budaya nasional Indonesia dan budaya global. Tetapi, upaya untuk membangun pendidikan Islam yang berwawasan global dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terencana dan strategis. Misalnya saja, bangsa Jepang tetap merupakan satu contoh bangsa yang mengglobal dengan tanpa kehilangan karakter

sebagai suatu bangsa⁹ yang maju dengan tetap kental dengan nilai-nilai tradisi dan nilai-nilai religius. Dengan contoh bangsa Jepang, maka pembinaan dan pembentukan nilai-nilai Islam tetap relevan, bahkan tetap dibutuhkan dan harus dilakukan sebagai "*kapital spritual*" untuk masyarakat dan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global menuju masyarakat madani Indonesia. Dari pandangan ini, tergambar bahwa peran pendidikan sangatlah sentral dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa mengalami penggeseran, sementara "sistem sosial, politik, dan ekonomi bangsa selalu menjadi penentu dalam penetapan dan pengembangan peran pendidikan"¹⁰.

Dengan paradigma baru tersebut, pendidikan Islam harus dapat mengembangkan kemampuan dan tingkah laku manusia yang dapat menjawab tantangan internal maupun tantangan global menuju masyarakat madani Indonesia. Pendidikan harus dikembangkan berdasarkan tuntutan acuan perubahan tersebut dan berdasarkan karakteristik masyarakat madani yang demokratis. Sedangkan untuk menghadapi kehidupan global, proses pendidikan Islam yang diperlukan adalah mampu mengembangkan kemampuan berkompetisi, kemampuan kerja sama, mengembangkan sikap inovatif, serta meningkatkan kualitas.

Dengan acuan ini, secara pasti yang akan terjadi adalah penggeseran paradigma pendidikan, sehingga kebijakan dan strategi pengembangan pendidikan perlu diletakkan untuk menangkap dan memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan tersebut, apabila tidak, maka pendidikan Islam akan menjadi pendidikan yang "termarginalkan" dan tertinggal ditengah-tengah kehidupan masyarakat global.

⁹Meskipun saat sekarang ini "konsep *nationalstate* mulai diragukan, dan diganti dengan *welfare state* bahkan *global state* yang tidak lagi mengenal tapal batas (*borderless*) karena kemajuan teknologi informasi, tetapi pembinaan karakter nasional tetap relevan dan bahkan harus dilakukan"[Ibid, hlm. 18].

¹⁰Ibid, hlm. 6.

⁸Ibid, hlm.16-17.

Pergeseran drastis paradigma pendidikan sedang terjadi, dengan terjadinya aliran informasi dan pengetahuan yang begitu cepat dengan efisiensi penggunaan jasa teknologi informasi internet yang memungkinkan tembusnya batas-batas dimensi ruang, birokrasi, kemampuan dan waktu. Pergeseran paradigma tersebut juga didukung dengan adanya kemauan dan upaya untuk melakukan reformasi total diberbagai aspek kehidupan bangsa dan negara menuju masyarakat madani Indonesia, termasuk pendidikan.

Oleh karena itu, pergeseran paradigma pendidikan tersebut juga diakui sebagai akibat konsekuensi logis dari perubahan masyarakat, yaitu berupa keinginan untuk merubah kehidupan masyarakat Indonesia yang demokratis, berkeadilan, menghargai hak asasi manusia, taat hukum, menghargai perbedaan dan terbuka menuju masyarakat madani Indonesia.

Selanjutnya, terjadi perubahan paradigma pendidikan juga sebagai akibat dari “percepatan aliran ilmu pengetahuan yang akan menantang sistem pendidikan konvensional yang antara lain sumber ilmu pengetahuan tidak lagi terpusat pada lembaga pendidikan formal [SD,SMP,SMU, dan PT] yang konvensional. Sumber ilmu pengetahuan akan tersebar dimana-mana dan setiap orang akan dengan mudah memperoleh pengetahuan tanpa kesulitan. Paradigma ini dikenal sebagai *distributed intelligence [distributed knowledge]*”¹¹ Kondisi ini, akan berpengaruh pada fungsi tenaga pendidik [guru dan dosen] dan lembaga pendidikan “akhirnya beralih dari sebuah sumber ilmu pengetahuan menjadi “mediator” dari ilmu pengetahuan tersebut. Proses *long life learning* dalam dunia pendidikan informal yang sifatnya lebih *learning based* dari pada *teaching based* akan menjadi kunci perkembangan sumber daya manusia. Peranan *web, homepage, cd-rom* merupakan alat bantu yang akan sangat

mempercepat proses *distributed knowledge* semakin berkembang. Hal ini, secara langsung akan menentang sistem kurikulum yang *rigid* dan sifatnya terpusat dan mapan yang kini lebih banyak dianut dan lebih difokuskan pada pengajaran [*teaching*] dan kurang pada pendidikan [*learning-based*”¹². Ilmu pengetahuan akan terbentuk secara kolektif dari banyak pemikiran yang sifatnya konsensus bersama dan tidak terikat pada dimensi birokrasi atau struktural.

Dengan demikian, pendidikan Islam harus mulai berbenah diri dengan menyusun strategi untuk dapat menyongsong dan dapat menjawab tantangan perubahan tersebut, apabila tidak maka pendidikan Islam akan tertinggal dalam persaingan global. Maka dalam menyusun strategi untuk menjawab tantangan perubahan tersebut, paling tidak harus memperhatikan beberapa ciri, yaitu:

- a. Pendidikan Islam diupayakan lebih diorientasikan atau “lebih menekankan pada upaya proses pembelajaran [*learning*] daripada mengajar [*teaching*]”.
- b. Pendidikan Islam dapat “diorganisir dalam suatu struktur yang lebih bersifat fleksibel”.
- c. Pendidikan Islam dapat “memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri”, dan
- d. Pendidikan Islam, “merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan”¹³

Keempat ciri ini, dapat disebut dengan paradigma pendidikan *sistematik-organik* yang “menuntut pendidikan bersifat *double tracks*, artinya pendidikan sebagai suatu proses yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakat”.

Dalam “pelaksanaan pendidikan senantiasa mengaitkan proses pendidikan dengan kebutuhan masyarakatnya pada umumnya dan dunia kerja pada khususnya. Karena keterkaitan ini memiliki arti, bahwa peserta didik tidak hanya ditentukan oleh

¹¹Onno W. Purbo, *Tantangan Bagi Pendidikan Indonesia*, From: <http://www.detik.com/net/onno/jurnal/20004/aplikasi/pendidikan/p-19.shtml>. 2000.

¹²Ibid, p-19.shtml. 2000.

¹³Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000), hlm.9.

apa yang mereka lakukan di lingkungan sekolah, melainkan peserta didik juga ditentukan oleh apa yang mereka kerjakan di dunia kerja dan di masyarakat pada umumnya¹⁴. Dengan kata lain pendidikan yang bersifat *double tracks*, menekankan pengembangan pengetahuan melalui kombinasi terpadu antara tuntutan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, pelatihan, dan pendidikan formal persekolahan, sehingga “sistem pendidikan akan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan fleksibilitas yang tinggi untuk menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat yang senantiasa berubah dengan cepat”¹⁵.

Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa “paradigma baru pendidikan Islam yang dimaksud di sini adalah pemikiran yang terus-menerus harus dikembangkan melalui pendidikan untuk merebut kembali kepemimpinan Iptek, sebagaimana zaman keemasan dulu. Pencarian paradigma baru dalam pendidikan Islam dimulai dari konsep manusia menurut Islam, pandangan Islam terhadap Iptek, dan setelah itu baru dirumuskan konsep atau sistem pendidikan Islam secara utuh”¹⁶. Pendidikan Islam harus dikembangkan berdasarkan paradigma yang berorientasi pada:

1. Paradigma baru pendidikan Islam harus didasarkan pada filsafat *teocentris* dan *antroposentris* sekaligus. Pendidikan Islam yang ingin dikembangkan adalah pendidikan yang menghilangkan atau tidak ada dikotomi antara ilmu dan agama, serta ilmu tidak bebas nilai tetapi bebas dinilai. Selain itu, mengajarkan agama dengan bahasa ilmu pengetahuan dan tidak hanya mengajarkan sisi tradisional, melainkan juga sisi rasional”¹⁷.
2. Pendidikan Islam mampu membangun keilmuan dan kemajuan kehidupan yang integratif antara nilai spritual, moral dan material bagi kehidupan manusia.

Pendidikan Islam mampu membangun kompetensi manusia dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik berupa manusia demokratis, kompetitif, inovatif berdasarkan nilai-nilai Islam.

3. Pendidikan Islam harus disusun atas dasar kondisi lingkungan masyarakat, baik kondisi masa kini maupun kondisi pada masa akan datang, karena perubahan kondisi lingkungan merupakan tantangan dan peluang yang harus diproses secara cepat dan tepat. Pendidikan Islam yang dikembangkan selalu diorientasikan pada perubahan lingkungan, karena pendekatan masa lalu hanya cocok untuk situasi masa lalu dan sering tidak tepat jika diterapkan pada kondisi berbeda, bahkan sering kali menimbulkan problem yang dapat memundurkan dunia pendidikan.
4. Pembaruan pendidikan Islam diupayakan untuk memberdayakan potensi umat yang disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan masyarakat madani. Sistem pendidikan Islam harus dikembangkan berdasarkan karakteristik masyarakat madani yang demokratisasi, memiliki kemampuan partisipasi sosial, mentaati dan menghargai supermasi hukum, menghargai hak asasi manusia, menghargai perbedaan [pluralisme], memiliki kemampuan kompetitif dan kemampuan inovatif.
5. Penyelenggaraan pendidikan Islam harus diubah berdasarkan pendidikan demokratis dan pendidikan yang bersifat sentralistik baik dalam manajemen maupun dalam penyusunan kurikulum harus disesuaikan dengan tuntutan pendidikan demokratis dan desentralistik. Pendidikan Islam harus mampu mengembangkan kemampuan untuk berpartisipasi di dalam dunia kerja, mengembangkan sikap dan kemampuan inovatif serta meningkatkan kualitas manusia.
6. Pendidikan Islam lebih menekankan dan diorientasikan pada proses pembelajaran, diorganisir dalam struktur yang lebih bersifat fleksibel, menghargai dan memperlakukan peserta didik sebagai

¹⁴Ibid, hlm. 9.

¹⁵Ibid, hlm. 9.

¹⁶Mastuhu, *Pemberdayaan Sistem...*, hlm. 15.

¹⁷Ibid, hlm. 15.

individu yang memiliki potensi untuk berkembang, dan diupayakan sebagai proses berkesinambungan serta senantiasa berinteraksi dengan lingkungan.

7. Pendidikan Islam harus di arahkan pada dua dimensi, yaitu “*Pertama*, dimensi dialektika [*horizontal*] yaitu pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya dan manusia harus mampu mengatasi tantangan dunia sekitarnya melalui pengembangan iptek, dan *Kedua*, dimensi ketunduhan vertikal, yaitu pen-didikan selain sarana untuk memantap-kan, memelihara sumberdaya alam dan lingkungannya, juga memahami hubungannya dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Swt”¹⁸.
8. Pendidikan Islam lebih diorientasikan pada upaya “pendidikan sebagai proses pembebasan, pendidikan sebagai proses pencerdasan, pendidikan menjunjung tinggi hak-hak anak, pendidikan menghasilkan tindakan perdamaian, pendidikan sebagai proses pemberdayaan potensi manusia, pendidikan menjadikan anak berwawasan integratif, pendidikan sebagai wahana membangun watak persatuan, pendidikan menghasilkan manusia demokratis, pendidikan menghasilkan manusia perduli terhadap lingkungan”, dan harus dibangun suatu pandangan bahwa “sekolah bukan satu-satunya instrumen pendidikan”¹⁹, karena pada era informasi sekarang ini, informasi ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai media elektronik dan media massa, seperti: internet dengan peran *web*, *homepage*, *cd-rom*, diskusi di internet, dan televisi, radio, surat kabar, majalah yang merupakan

alat bantu yang akan sangat mempercepat proses *distributed knowledge*.

Mencermati fenomena perubahan paradigma baru tersebut, maka paradigma lama pendidikan Islam yang telah terbangun sejak abad pertengahan [periode Islam], dengan mengkaji dan mempelajari teks-teks keagamaan dengan metode hafalan, bersifat mekanis, mengutamakan pengkayaan materi, sudah harus ditinggalkan untuk menuju paradigma baru pendidikan. Faisal Ismail, menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran dalam Islam bukanlah sekedar kegiatan untuk mewariskan harta kebudayaan dari generasi terdahulu kepada generasi penggantinya yang hanya memungkinkan bersifat reseptif, pasif, menerima begitu saja. Akan tetapi pendidikan Islam harus berusaha mengembangkan dan melatih peserta didik untuk lebih bersifat direktif, mendorong agar selalu berupaya maju, kreatif dan berjiwa membangun.

Pendidikan Islam harus berorientasi kepada pembangunan dan pembaruan, pengembangan kreativitas, intelektualitas, keterampilan, kecakapan penalaran yang dilandasi dengan “keluhuran moral” dan “kepribadian”, sehingga pendidikan Islam akan mampu mempertahankan relevansinya di tengah-tengah laju pembangunan dan pembaruan paradigma sekarang ini, sehingga pendidikan Islam akan melahirkan manusia yang belajar terus [*long life education*], mandiri, disiplin, terbuka, inovatif, mampu memecahkan dan menyelesaikan berbagai problem kehidupan²⁰, serta berdayaguna bagi kehidupan dirinya dan masyarakat. Paradigma baru pendidikan Islam harus diorientasikan kepada pembangunan, pembaruan, pengembangan kreativitas, intelektualisme, keterampilan, kecakapan, penalaran, inovatif, mandiri, disiplin dan taat hukum, terbuka dalam masyarakat plural, dan mampu menghadapi serta menyelesaikan persoalan pada era globalisasi dengan

¹⁸Hujair AH. Sanaky, “*Studi Pemikiran Pendidikan Islam Modern*”, Jurnal Pendidikan Islam, Konsep dan Implementasi, Volume V Th IV, ISSN: 0853 – 7437, FIAI UII, Yogyakarta, Agustus 1999, hlm. 11

¹⁹Djohar, “*Soal Reformasi Pendidikan Omong Kosong, Tanpa Mengubah UU No.2/89*”, Kedaulatan Rakyat, 4 Mei 1999, Yogyakarta.

²⁰Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta: Tiara Ilahi Press, 1998), hl.97-98.

dilandasi keanggunan moral dan akhlak dalam usaha membangun manusia dan masyarakat yang berkualitas bagi kehidupan dalam masyarakat madani Indonesia.

Paradigma pendidikan yang strategis adalah paradigma yang sangat terkait dengan peranan pendidikan itu sendiri. John C. Bock, dalam *Educational and Development: A Conflict Meaning* (1992), mengidentifikasi peranan pendidikan, yaitu: (a) memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa, (b) mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial, (c) untuk meratakan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan dan dua peran yang lain merupakan fungsi ekonomi.²¹ Dari pandangan ini berbagai paradigma dirumuskan, misalnya peranan pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan pendidikan, yaitu paradigma fungsional dan sosialisasi. Paradigma fungsional melihat keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. Sedangkan paradigma sosialisasi melihat peran pendidikan dalam pembangunan adalah (a) mengembangkan kompetensi individu, (b) kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan (c) secara umum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat.²²

Paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi telah melahirkan dua pandangan. *Pertama*, paradigma pendidikan yang bersifat analisis-mekanistik dengan mendasarkan pada doktrin reduksionisme dan mekanistik. Doktrin reduksionisme melihat pendidikan sebagai barang yang dapat dipecah-pecah dan dipisah-pisah satu dengan lain. Doktrin mekanistik melihat pecahan-pecahan atau bagian-bagian tersebut memiliki keterkaitan linier fungsional. Akibatnya, pendidikan direduksi sedemikian rupa ke dalam

serpihan-serpihan kecil, terpisah dan tidak ada hubungan, seperti kurikulum, kredit SKS, pokok bahasan, program pengayaan, pekerjaan rumah, dan lain-lain. Kemudian muncul paradigma pendidikan *Input-Proses-Output*, menjadikan sekolah sebagai proses produksi, murid diperlakukan bagaikan *raw-input* suatu pabrik. Guru, kurikulum, dan fasilitas pendidikan diperlakukan sebagai *instrumental input*.²³ Jika *raw input* dan *instrumental input* baik, maka akan menghasilkan proses yang baik dan produk yang baik pula. Paradigma pendidikan “diperlakukan sebagai sistem yang bersifat mekanik yang perbaikannya dapat bersifat parsial. Paradigma ini tidak pernah melihat pendidikan sebagai suatu proses yang utuh dan bersifat organik yang merupakan bagian dari proses kehidupan masyarakat”²⁴. *Kedua*, “para pengambil kebijakan pemerintah menjadikan pendidikan sebagai engine of growth, yaitu pendidikan sebagai penggerak dan loko pembangunan. Pendidikan harus mampu menghasilkan invention dan innovation, yang merupakan inti kekuatan pembangunan. Kemudian agar berhasil melaksanakan fungsinya, pendidikan harus diorganisir dalam suatu lembaga pendidikan formal sistem persekolahan, yang bersifat terpisah dan berada di atas dunia yang lain, khususnya dunia ekonomi. Pendidikan harus menjadi panutan dan penentu perkembangan dunia yang lain, khususnya dan bukan sebaliknya.

Dalam lembaga pendidikan formal berbagai ide dan gagasan akan dikaji, berbagai teori diuji, berbagai metode akan dikembangkan, dan berbagai tenaga kerja dengan berbagai jenis kemampuan akan dilatih. Namun, pengalaman selama ini menunjukkan, pendidikan dengan sistem persekolahan tidak dapat berperan sebagai penggerak dan loka pembangunan. Goss (1984) dalam *Education versus Qualifications*, menyatakan pendidikan telah menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi, dengan berbagai kesenjangan: kultural, sosial, dan khususnya kesenjangan

²¹Zamroni, 2000, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hlm. 2

²²Ibid, hlm. 3.

²³Ibid, hlm. 4

²⁴Ibid, hlm. 4.

vakasional dalam bentuk melimpahnya pengangguran terdidik²⁵. Berbagai problem pendidikan yang muncul tersebut bersumber pada kelemahan sistem pendidikan yang tidak mungkin disempurnakan hanya lewat upaya pembaruan yang bersifat tambal sulam, tetapi harus dimulai dari mencari paradigma peran pendidikan dalam upaya memberdayakan masyarakat.

Rahman, mengatakan perlu mewarnai bidang-bidang kajian tingkat tinggi dengan nilai-nilai Islam. "Masalah pokoknya bagaimana "memodernisasi" pendidikan Islam, yakni membuatnya mampu untuk produktivitas intelektual Islam yang kreatif dalam semua bidang usaha intelektual bersama-sama dengan keterikatan yang serius kepada Islam.

Pada abad pertengahan terjadi dialog yang panjang anatar al-Gazali dengan aspek spritualnya dan Ibnu Rus rasionalnya. Nampaknya pada masyarakat modern pendidikan Islami perlu mengawinkan dua pola pemikiran ini menjadi satu pola pikir yang digunakan untuk menjawab tantangan peradaban modern ini.

Bahan-bahan pelajaran yang digunakan adalah kitab-kitab pelajaran yang didatangkan dari Mesir, sedangkan untuk mata pelajaran umum seperti ilmu bumi dan sejarah juga diajarkan, tetapi pelajaran agama merupakan mata pelajaran utama dikedua lembaga tersebut. Untuk para pelajar pada "tingkat tinggi", bahan pelajaran menggunakan kitab-kitab Abduh dan Rashid Redha terutama Tafsir *al-Manar* dan mereka juga membaca kitab-kitab *Taqi al-Din Ahmad Ibn Taimiyah* [1263-1328] yang "tidak tunduk" pada otoritas manapun, dan sangat kritis mengecam bid'ah, pemujaan wali-wali keramat, bai'at dan ziarah ke tempat-tempat keramat".²⁶

Kembali kepada peran pemerintah kolonial Belanda dengan kebijaksanaannya yang bermaksud "membarat-baratkan dan mengkristenkan bangsa Indonesia melalui

pendidikan dan pengajaran yang diterapkannya, terutama melalui kalangan atas atau kaum ningrat. Kkebijaksanaan tersebut tidak berhasil karena pada "kenyataannya orang-orang "atasan" yang dibesarkan dalam pendidikan Barat, seperti Hoesein Djajadiningrat, Noto Soesanto, Ahmad Djajadiningrat, Soejono Koesoemojoedo dan lain-lainnya, yang dianggap sebagai hasil politik Asosiasi Hurgronje, tidak dengan sendirinya mejadi "Belanda-Belanda" sebagaimana diharapkan".²⁷

Bahkan terdapat beberapa orang Islam yang berpendidikan Barat tidak kehilangan identitasnya sebagai muslim dan bangsa Indonesia. Ilmu-ilmu yang diperoleh dari didikan Barat tidak mengubah dan melunturkan identiasnya sebagai putra pribumi, justru menper tebal keyakinan agama dan memperkokoh nasionalisme mereka. Putra-putra bangsa yang disebut sebagai "produk Politik Etis Belanda ternyata tidak pernah lupa dengan kepribadiannya masing-masing, baik sebagai bangsa Indonesia maupun sebagai muslim"²⁸, walaupun disatu sisi mereka justru dijauhi oleh rakyat. Uraian ini, memberikan gambaran bahwa umat Islam tidak perlu khawatir untuk mempelajari dan menerima modernisasi dari produk Barat, asalkan bersifat kritis dan selektif terhadap perubahan tersebut.

III. KESIMPULAN

Terlepas dari konteks "masyarakat madani", maka pendidikan menjadi tidak relevan dengan kebutuhan umat Islam pada kondisi masyarakat tersebut (masyarakat madani). Jadi, kebutuhan umat yang amat mendesak sekarang ini adalah mewujudkan dan meningkatkan kualitas manusia Muslim menuju masyarakat madani. Untuk itu umat Islam Indonesia perlu dipersiapkan dan harus dibebaskan dari ketidaktahuannya (ignorance) akan kedudukan dan peranannya dalam kehidupan "masyarakat madani"

²⁵ Ibid, hlm. 5

²⁶ Philip K.Hitti, *History of Arabs*, London: MacMillan & Co.Ltd.,1960,hlm.689., dalam: Delian Noer, Ibid, hlm.56.

²⁷ Machnun Husein, Op.cit., hlm. 12.

²⁸ Ibid, hlm. 12.

dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Islam haruslah dapat meningkatkan mutu umatnya dalam menuju "masyarakat madani". Kalau tidak umat Islam akan ketinggalan dalam kehidupan "masyarakat madani" yaitu masyarakat ideal yang dicita-citakan bangsa ini. Maka tantangan utama yang dihadapi umat Islam sekarang adalah peningkatan mutu sumber insannya dalam menempatkan diri dan memainkan perannya dalam komunitas masyarakat madani dengan menguasai ilmu dan teknologi yang berkembang semakin pesat. Karena, hanya mereka yang menguasai ilmu dan teknologi modern dapat mengolah kekayaan alam yang telah diciptakan Allah untuk manusia dan diamanatkan-Nya kepada manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini untuk diolah bagi kesejahteraan umat manusia.

Dalam konteks ini juga perlu pemikiran kembali tujuan dan fungsi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada. Memang diakui bahwa penyesuaian lembaga-lembaga pendidikan akhir-akhir ini cukup mengemburkan, artinya lembaga-lembaga pendidikan memenuhi keinginan untuk menjadikan lembaga-lembaga tersebut sebagai tempat untuk mempelajari ilmu umum dan ilmu agama serta keterampilan. Tetapi pada kenyataannya penyesuaian tersebut lebih merupakan peniruan dengan tambal sulam atau dengan kata lain mengadopsi model yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan umum, artinya ada perasaan harga diri bahwa apa yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan umum dapat juga dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan agama, sehingga akibatnya beban kurikulum yang terlalu banyak dan cukup berat dan terjadi tumpang tindih.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam mengambil secara utuh semua kurikulum (non-agama) dari kurikulum sekolah umum, kemudian tetap mempertahankan sejumlah program pendidikan agama, sehingga banyak bahan pelajaran yang tidak bisa dicerna oleh peserta didik secara baik, sehingga produk (hasil) serba setengah-

tengah atau tanggung baik pada ilmu umum maupun pada ilmu agama. Untuk itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam sebenarnya mulai memikirkan kembali disain program pendidikan untuk menuju masyarakat madani, dengan memperhatikan relevansinya dengan bentuk atau kondisi serta ciri masyarakat madani. Maka untuk menuju "masyarakat madani", lembaga-lembaga pendidikan Islam harus memilih satu di antara dua fungsi yaitu apakah mendisain model pendidikan umum Islami yang handal dan mampu bersaing secara kompetitif dengan lembaga pendidikan umum atau mengkhususkan pada disain pendidikan keagamaan yang handal dan mampu bersaing secara kompetitif, misalnya mempersiapkan ulama-ulama dan mujtahid-mujtahid yang berkaliber nasional dan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman an-Bahlawi, *Ushulut Tarbiyah Islamiyah wa Asalibiha fi Baiti wal Madrasati wal Mujtama'*, Dar al-Fikr al-Mu'asyir, Beirut-Libanon, Cet. II, 1983., Terj., Shihabuddin, Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat, Gema Insani Press, 1995.
- Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, al-Ma'arif, Bandung, Cet.III, 1974.
- Anwar Jasin, *Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam: Tinjauan Filosofis*, 1985. Conference Book, London, 1978.
- Fathiyah Hasan Sulaiman, *Bahts fi 'L-Madzhab al-Tarbawy 'Inda 'L-Ghazaly, Maktabah Nadhlah*, Mesir, 1964., Terj., Ahmad Hakim dan M.Imam Aziz, Konsep Pendidikan al-Ghazali, P3M, Jakarta, Cet. I, 1986.
- H.A.R. Tilar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*, Tera Indonesia, Magelang, Cet. I, 1998.

- Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan Sistem & Metode*, Penerbit Andi, Yogyakarta, Cet. Kesembilan, 1997.
- Komaruddin Hidayat, Masyarakat Agama dan Agenda Penegakan Masyarakat Madani, Makalah "Seminar Nasional dan Temu Alumni, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Tanggal, 25-26 September 1998.
- Masykuri Abdillah, *Islam dan Masyarakat Madani*, Koran Harian Kompas, Sabtu, 27 Februari 1999, halaman 4.
- Mufid, *Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani*, Makalah "Seminar Nasional dan Temu Alumni, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang", Tanggal, 25-26 September 1998.
- Muslim Usa (editor), *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta*, Tiara Wacana, Yogyakarta, Cet. I, 1991.
- M.Rusli Karim, *Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pembebasan Manusia, dalam Buku Pendidikan Islam di Indonesia antara Citra dan Fakta*, Editor : Muslih Usa, Tiara Wacana, Yogya, Cet.Pertama, 1991.
- Roihan Achwan, *Prinsip-prinsip Pendidikan Islam Versi Mursi*, dlm. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Volume 1, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1991.
- Soroyo, *Antisipasi Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial Menjangkau Tahun 2000*, dalam Buku : Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta, Editor: Muslih Usa, Tiara Wacana, Yogya, 1991.
- Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, *Crisis Muslim Education.*, Terj. Rahmani Astuti, Krisis Pendidikan Islam, Risalah, 1986.
- Thoha Hamim, *Islam dan Masyarakat Madani (1) Ham, Pluralisme, dan Toleransi Beragama*, Koran Harian "Jawa Pos", Kamis Kliwon, Tanggal, 11 Maret 1999.
- Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. II, 1995.